



KR-Antara/Aprillio Akbar/foc

MUDIK MOTOR GRATIS: Pekerja memasukkan sepeda motor milik peserta Program Mudik Motor Gratis (Motis) Lebaran 2024 ke dalam gerbong kereta api di kawasan Stasiun Jakarta Gudang, Kampung Bandan, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyediakan kuota untuk Motis sebanyak 12.180 unit sepeda motor yang diberangkatkan 2-8 April 2024, sedangkan angkutan balik Motis 13-19 April 2024.

SOAL LAPORAN JAKSA PERAS SAKSI

KPK Sebut Tak Ada Pelanggaran Etik

JAKATA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Dewas KPK menyatakan tidak ada pelanggaran etik dalam laporan dugaan pemerasan oleh jaksa terhadap seorang saksi. Lapornya satu tahun yang lalu, Januari 2023. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dewas dari Januari sampai Desember dan tidak menemukan bukti indikasi pelanggaran etik.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/4). Menurutny, KPK juga menindaklanjuti laporan tersebut dengan diteruskan ke Kedeputan Penindakan dan Kedeputan Pencegahan untuk dilakukan pendalaman. Hasilnya juga menegaskan tidak ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh jaksa tersebut.

"Nah, kemudian Desember di-nota dinaskan untuk dilakukan pemeriksaan di (Kedeputan) penindakan dan pencegahan. Pak Alex (Marwata) bilang surat belum keluar kan, karena memang sudah dilakukan pengumpu-

lan bukti sementara tidak ada indikasi itu," ujarnya.

KPK menegaskan telah menangani perkara tersebut dengan serius dan telah berkoordinasi dengan PPAK untuk mendalami data transaksi terhadap yang bersangkutan. Namun memang tidak ada indikasi ada aliran uang terkait pemerasan tersebut.

Pihak KPK bahkan akan segera mendalami Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap jaksa tersebut. "Termasuk kemudian makanya kami coba kembali dalam itu melalui pencegahan melalui LHKPN nanti setelah Lebaran baru

diklarifikasi tapi indikasi-indikasinya memang tidak ditemukan," ujarnya

Smentara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan jaksa berinisial TI tersebut saat ini telah kembali berdinan di instansi Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Pasti akan kami komunikasikan apalagi yang bersangkutan sudah ada surat pengembalian, sudah lebih dari 10 tahun. Sekarang sudah di Kejaksaan," kata Alex di Jakarta, Selasa (2/4).

Alex mengatakan pengembalian jaksa TI ke Kejagung tidak ada kaitan dengan dugaan kasus tersebut. "Kalau dari catatan sih enggak ada kaitannya. Kan enggak menghalangi juga sekali pun yang bersangkutan sudah ditugaskan kembali di instansi asalnya. Ketika KPK akan memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, kan enggak jadi persoalan juga. Hanya perlu koordinasi dengan Kejaksaan Agung," ujarnya. **(Ant/Has)-d**

14 Calon Anggota LPSK Ikuti 'Fit and Proper Test'

JAKARTA (KR) - Komisi III DPR RI merampungkan tahapan *fit and proper test* (uji kepatutan dan kelayakan) terhadap 14 orang calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun agenda ujian terhadap 14 calon anggota dari beragam latar belakang tersebut digelar secara terbuka sejak Senin (1/4). Setelah selesai menguji semua calon, Komisi III DPR menggelar rapat secara tertutup.

"Kita selanjutnya acaranya tertutup," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/4).

Selama proses pengujian, sejumlah anggota Komisi III DPR pun melakukan pendalaman terhadap para calon anggota LPSK. Di antaranya, menguji rencana dan strategi jika nantinya terpilih menjadi anggota.

Di antaranya, Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menanyakan kepada calon anggota LPSK terkait rencana penanganan 12 pelanggaran HAM berat pada masa lalu yang sudah dinyatakan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan pun ingin calon anggota LPSK yang nantinya terpilih itu menjembatani hak-hak saksi dalam serangkaian proses hukum. Karena, menurutnya, sering kali ada pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap saksi, tetapi belum bisa didampingi kuasa hukum.

Pada Senin (1/4) dan Selasa (2/4) ini, Komisi III DPR RI menggelar *fit and proper test* kepada 14 calon Anggota LPSK di Kompleks Parlemen Jakarta. Tes tersebut dibagi masing-masing harinya untuk tujuh calon anggota.

Pada Senin (1/4), tujuh orang calon Anggota LPSK yang mengikuti *fit and proper test*, yaitu Susilaningtias (Wakil Ketua LPSK saat ini), Sri Suparyati (Manajer Internal Lokataru), Margaretha Hanita (Dosen UI), Apong Herlina (Anggota Komisi Kejaksaan), Wahyu Wagiman (advokat), Antonius Wibowo (Wakil Ketua LPSK saat ini), dan Wawan Fahrudin (Stafus Kepala BPMI).

Pada Selasa (2/4), tujuh orang anggota LPSK lainnya yang ikut tes tersebut yakni Yosep Adi Prasetyo (Peneliti Komisi Informasi Pusat), Achmadi (Wakil Ketua LPSK saat ini), Mardjoeki (Asesor Kemenkumham), Asnifriyanti Damanik (advokat), Subhan (tenaga ahli Yayasan Adil Sejahtera), Sri Nurherwati (advokat) dan Mahyudin (Dosen Universitas Ibnu Chaldun). **(Ant)-d**

HINGGA MARET 2024

Satgas PASTI Stop 2.601 Entitas Keuangan Ilegal

JAKARTA (KR) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memblokir 2.601 entitas keuangan ilegal hingga 28 Maret 2024.

"Sejak 1 Januari 2023 sampai 28 Maret 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 2.601 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 42 investasi ilegal dan 2.559 pinjaman online ilegal," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Friderica Widayarsi Dewi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisiner Bulanan di Jakarta, Selasa (2/4).

Dengan demikian, ia menyampaikan, Satgas PASTI telah memblokir total 8.462 entitas ilegal sejak 2017. Penghentian 2.601 entitas ilegal tersebut dilakukan berdasarkan 264 pengaduan terkait investasi ilegal dan 4.900 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal yang diterima per 28 Maret.

Selain berbagai pengaduan tentang aktivitas keuangan ilegal, Friderica mengatakan, pihaknya juga menerima 413.414 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) OJK, termasuk 29.623 pengaduan terkait sektor jasa keuangan.

Menurutnya, sebanyak 1.369 pengaduan

dari total aduan tersebut berindikasi pelanggaran, sementara sisanya merupakan kasus sengketa yang kemudian ditangani Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

Ia menyebutkan, kini jumlah pengaduan yang masih dalam proses penyelesaian tinggal 9,17 persen. Sepanjang 2024 ini, pihaknya juga telah melakukan penegakan hukum kepada tiga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melanggar Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

OJK memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu bank umum dan satu perusahaan pembiayaan serta menjatuhkan denda kepada satu bank umum. "Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam hal perlindungan konsumen, PEPK telah memberikan 29 surat peringatan tertulis kepada 29 PUJK selama 2024," ucap Friderica.

Ia menuturkan, sepanjang tahun ini bidang PEPK OJK telah melayangkan surat perintah terkait penyelesaian pengaduan konsumen kepada tiga PUJK dan sanksi denda kepada 10 PUJK. "Kemudian, kami telah meminta 50 PUJK untuk mengganti kerugian konsumen atas 172 pengaduan sebesar Rp 63.792.098," katanya. **(Ant/San)-d**

KUDUS (KR) - Perusahaan rokok terbesar PT Djarum membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024 kepada 51.317 karyawan borong dan harian di sembilan kota di Indonesia, dengan nilai total sebesar Rp 129,95 miliar, Selasa (2/4). Jumlah tersebut belum termasuk ribuan buruh bulanan yang tersebar di Tanah Air. THR yang dibagikan kali ini jauh lebih besar dari nominal yang diserahkan tahun sebelumnya.

Tahun 2023, THR yang diberikan PT Djarum Rp 117,24 miliar untuk 49.237 orang karyawan. Artinya, THR 2024 yang diberikan perusahaan berpusat di Kudus tersebut naik sekitar 10,84 persen dibanding 2023. Di Kudus, masih ada puluhan pabrik rokok menengah dan kecil yang belum membagikan THR.

Public Affairs Senior Manager PT Djarum Kudus Purwono Nugroho membe-

Hikmah Ramadan

Sains Lailatul Qadar

Oleh: Prof Dr Fahmi Amhar



cara subjektif pada segelintir orang yang kebetulan berburu LQ.

Dari tiga hal ini, timbul pertanyaan: apakah LQ itu sangat lokal: hanya di lokasi yang sedang malam saja, yang malam ganji, dan tidak sedang tertutup awan? Sulit menjawabnya secara saintifik.

Namun kalau menelisik hadits-hadits LQ, maka tampak bahwa: Pertama, hadits-hadits ini tidak *qath'iy*, baik dalam riwayat maupun *dalalah*. Jadi memang sulit dicarikan legitimasi objektif empiris sebagaimana sifat sains.

Kedua, kemungkinan LQ akan menjadi pengalaman spiritual yang subjektif bagi pelaku ibadah yang memang serius, khususnya di malam yang sama. Allah memilih hambanya yang pantas untuk diturunkan sesuatu atasnya, dan malaikat atas izin-Nya mengatur segala urusannya. Boleh jadi hambanya tersebut adalah seorang ibu yang sedang merawat bayinya. Boleh jadi dokter yang sedang menyelamatkan pasiennya. Boleh jadi hakim-hakim MK yang ingin memutus perkara secara bijaksana.

Maka tak tepat pula orang yang menunda melaksanakan kewajiban atau kebaikan, karena ingin dilakukan pas malam LQ. Bukankah tetap lebih baik untuk kewajiban atau kebaikan itu disegerakan, karena kita tidak pernah tahu ujung usia kita? Jangan-jangan usia kita tak sampai di malam LQ?

Kemudian urusan yang Allah turunkan malaikat atas kita, itu boleh jadi sudah Allah berikan dalam triliunan sel sehat di tubuh kita, aliran darah yang lancar, nafas yang lega, mata yang terang, dan pikiran yang jernih.

Jadi, LQ tak perlu ditunggu legitimasi saintifiknya. Marilah kita bertolmba mengisi hari-hari kita dengan amal shaleh. Semoga Allah terima ibadah kita semua, dan dilipgandakan faedahnya di malam Lailatul Qadar. (*)**f**

Prof. Dr. Fahmi Amhar, Anggota Dewan Pakar Ikatan Alumni Program Habibie.

Redaksi menerima sumbangan naskah Hikmah Ramadan. Naskah bisa dikirim ke email naskahkr@gmail.com (Red)

HARI INI APEL GELAR PASUKAN Polri Antisipasi Kerawanan di Jalur Mudik

JAKARTA (KR) - Seluruh jajaran Polri diminta untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat untuk menciptakan pengelolaan mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1445H/2024 aman dan lancar. Jajaran Polri betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik, sehingga masyarakat yang melaksanakan mudik dan balik yang jumlahnya jauh lebih besar, namun semuanya diharapkan bisa terkelola dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo usai kegiatan silaturahmi ke Keluarga Besar Persatuan Umat Islam (PUTI) di Jakarta, Selasa (2/4). Untuk memastikan kesiapan jajarannya, Kapolri turun langsung mengecek kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2024 untuk mengawal pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2024.

"Jadi dalam beberapa waktu ke depan kami akan mengecek secara langsung khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan mungkin juga wilayah Bali untuk memastikan kesiapan masing-masing satuan," katanya.

Mantan Kapolda Banten itu menyebut, dalam Operasi Ketupat ini Polri bekerja

sama dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk memastikan jalur dan fasilitas penunjang di ruas jalan yang dilalui pemudik dapat meminimalisasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. "Kita tahu pasti akan ada potensi kemacetan, namun mudah-mudahan dengan kehadiran, dengan rekayasa yang kami siapkan itu bisa membantu untuk mempercepat, menormalkan kembali atau mengurai potensi-potensi yang macet," ujarnya.

Sigit menambahkan, untuk memastikan kesiapan akhir personel Polri dalam mengamankan mudik dan balik lebaran tahun ini, besok, Rabu (3/4) dilaksanakan apel gelar pasukan. "Sebentar lagi kami melaksanakan apel gelar pasukan untuk memulai pelaksanaan operasi ketupat, dalam rangka melayani kegiatan arus mudik dan balik," katanya.

Mantan Kabareskrim Polri itu juga memastikan sudah mengantisipasi segala hal, baik itu kerawanan di jalur mudik, rawan kemacetan, rawan kecelakaan, termasuk rawan tindak kriminalitas. "Titik-titik yang menjadi permasalahan baik itu kemacetan, kejahatan, semua sudah kami petakan," tutur Sigit. **(Ant/Has)-d**

PT DJARUM BAGIKAN THR

Rp 129,95 M untuk 51.317 Karyawan

KR-Mc Thoriq

Buruh rokok PT Djarum menunjukkan THR yang diterimanya.

narkan, THR buruh harian dan borong kali ini mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu. Dari sisi jumlah buruh keseluruhan juga bertambah 2.080 karyawan.

Peningkatan THR terjadi selain karena bertambahnya jumlah karyawan, juga karena ada kenaikan upah khusus buruh rokok 2024 rata-rata perbulan sebesar Rp 2.695.000, sesuai kesepakatan dengan Persatuan

Perusahaan Rokok Kudus (PPRK). Khusus upah buruh rokok di 'Kota Kretek' ini tidak menggunakan patokan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kudus 2024 sebesar Rp 2.516.888.

"Setiap buruh menerima THR minimal satu bulan gaji di atas UMK, atau sesuai yang disepakati bersama PPRK sebesar Rp 2.695.000," tegas Public Affairs Manager PT Djarum Kudus Rahma Mochtar

Kusumasasra.

Rachma mengungkapkan, total THR yang diserahkan PT Djarum kepada 51.317 karyawan sebesar Rp 129,95 miliar, tersebar di sembilan kota di seluruh Indonesia yakni Kudus, Demak, Pati, Rembang, Jepara, Lombok NTB, Temanggung, Sragen, dan Sukoharjo.

"Dari total 50.000 lebih, 83 persennya bermukim di Kudus dan sekitarnya. THR yang kami bagikan di daerah Kudus mencapai kurang lebih Rp 113 miliar," jelas Rahma.

Senior Manajer Publik Affairs PT Djarum, Slamet Raharjo menambahkan, penyerahan THR dilakukan secara serentak di 23 gudang produksi (brak) milik PT Djarum. Di Kudus secara simbolis diserahkan kepada sekitar 700 karyawan di Brak Bitingan Lama (BL) No 53 Jalan Loekmono Hadi, Desa Panjuman, Kudus. **(Trq)-d**